

**LAPORAN SINGKAT KOMISI I DPR RI**  
**(KEMENTERIAN PERTAHANAN, KEMENTERIAN LUAR NEGERI, KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, TENTARA NASIONAL INDONESIA, BADAN INTELIJEN NEGARA, BADAN SIBER DAN SANDI NEGARA, LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL, BADAN KEAMANAN LAUT, DEWAN KETAHANAN NASIONAL, LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA, LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK TELEVISI REPUBLIK INDONESIA, DEWAN PERS, KOMISI PENYIARAN INDONESIA PUSAT, KOMISI INFORMASI PUSAT, LEMBAGA SENSOR FILM, DAN PERUM LKBN ANTARA)**

---

Rapat ke	:	28 (dua puluh delapan)
Masa Persidangan	:	I
Tahun Sidang	:	2024 – 2025
Jenis Rapat	:	Rapat Kerja (Raker) Komisi I DPR RI dengan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) R.I
Hari, Tanggal	:	Senin, 23 September 2024
Pukul	:	10.00 WIB
Sifat Rapat	:	Terbuka
Pimpinan Rapat	:	1. Meutya Viada Hafid, Ketua Komisi I DPR RI 2. Dilanjutkan oleh Dr. H. Abdul Kharis Almasyhari, Wakil Ketua Komisi I DPR RI
Sekretaris Rapat	:	Sartomo, S.S., M.Si., Kabagset Komisi I DPR RI
Tempat	:	Ruang Rapat Komisi I DPR RI, Gedung Nusantara II Lt.1, Jalan. Jenderal Gatot Soebroto, Jakarta 10270
Acara	:	Pembahasan terkait Pencegahan Serangan Siber di Masa Depan terhadap PDNS (Pusat Data Nasional Sementara)
Hadir	:	1. ... orang dari 49 Anggota Komisi I DPR RI 2. Menkopolhukam R.I, Hadi Tjahjanto.; beserta jajaran.

## **I. PENDAHULUAN**

1. Sesuai dengan ketentuan Pasal 276, Pasal 281 ayat (1), dan Pasal 282 ayat (1) Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib, Ketua Rapat membuka Rapat pada pukul 10.51 WIB dan dinyatakan terbuka untuk umum.
2. Raker Komisi I DPR RI dengan Menkopolhukam R.I pada hari Senin, tanggal 23 September 2024 dengan acara dan waktu sebagaimana tersebut di atas, dipimpin oleh Meutya Viada Hafid., Ketua Komisi I DPR RI dan dilanjutkan oleh Dr. H. Abdul Kharis Almasyhari, Wakil Ketua Komisi I DPR RI.

## II. CATATAN

1. Komisi I DPR RI telah mendengarkan penjelasan Menko Polhukam terkait perkembangan penanganan insiden di Pusat Data Nasional Sementara (PDNS). Dalam penjelasan tersebut, Menko Polhukam menyatakan bahwa PDNS-2 telah pulih pelayanannya.
2. Komisi I DPR RI mendesak Pemerintah untuk menempatkan PDNS dan PDN, yang merupakan penjaga utama dari informasi kritis dan layanan vital, pada Tier 4 mengingat di era digital yang semakin maju, data telah menjadi salah satu aset paling berharga bagi sebuah negara.
3. Komisi I DPR RI mendesak Kemkominfo untuk melakukan beberapa langkah strategis antara lain:
  - a. Secara berkesinambungan melakukan pembaruan tata kelola secara menyeluruh di semua aspek guna meminimalkan risiko ancaman gangguan terhadap PDNS dan PDN.
  - b. Melakukan penguatan infrastruktur TIK yang mampu mendukung keamanan siber PDNS dan PDN.
  - c. Memastikan bahwa infrastruktur yang digunakan PDNS dan PDN yang berasal dari negara lain harus bebas dari ancaman terhadap kedaulatan siber di Indonesia.

## III. PENUTUP

Rapat ditutup pukul 12.31 WIB.

**MENTERI KOORDINATOR BIDANG POLITIK,  
HUKUM DAN KEAMANAN R.I**

Jakarta, 23 September 2024  
**KETUA RAPAT,**

**HADI TJAHJANTO**

**DR. H. ABDUL KHARIS ALMASYHARI**  
**A-442**